# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Dikarenakan Indonesia bersifat sebagai negara kesatuan, tiap wilayah di dalamnya diberi peluang untuk melaksanakan pemerintahan daerah otonom guna meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi yang ada. Dalam menerapkan otonomi daerah, aspek yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah memahami sejauh mana kemandirian finansial mereka, karena upaya pembangunan tentu akan memerlukan sumber dana. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah tertentu guna meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, kemudia akan dimanfaatkan untuk mendukung beragam proyek. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut peraturan ini, pemerintah daerah memiliki izin untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya yang mereka miliki guna meningkatkan pendapatan.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan sebuah kota besar dengan jumlah penduduk yang melimpah, dan berperan sebagai pusat industri serta perkembangan yang menjadi acuan ekonomi diIndonesia. Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi empat wilayah kota, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur, yang semuanya memiliki status sebagai wilayah administratif. Diberbagai kesempatan, kita dapat melihat berbagai iklan dan pesan promosi untuk memperkenalkan produk dan jasa kepada masyarakat yang menggunakan gambar dan kata-kata menarik, dengan tujuan untuk lebih dikenal.

Bisnis restoran dan hiburan juga berkembang pesat di DKI Jakarta. Kota ini dikenal sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pariwisata, sehingga menarik banyak wisatawan lokal dan internasional. Kehadiran wisatawan ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan bagi restoran dan hiburan di wilayah tersebut. Berkaitan dengan ini, seiring dengan bertambahnya jumlah tempat hiburan dan tempat makan, sektor bisnis restoran dan hiburan juga mengalami pertumbuhan. Semakin banyak jumlah restoran dan hiburan di suatu daerah, semakin besar pula pendapatan yang dihasilkan, dan ini juga berdampak pada penerimaan pajak yang lebih tinggi.

Galaxy Reflexology adalah perusahaan medis yang menawarkan pijat refleksi kepada kliennya. Sebagai suatu perusahaan dalam industri hiburan, Galaxy Reflexology diwajibkan membayar pajak hiburan yang dikumpulkan oleh otoritas pemerintah daerah. Efisiensi pemungutan pajak hiburan dapat dianalisis di Galaxy Reflexology untuk mengetahui apakah kebijakan pemungutan pajak hiburan efektif dan berkontribusi terhadap pendapatan negara. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan saat menentukan apakah pemungutan pajak hiburan Galaxy Reflexology efektif, antara lain: (1) Kebijakan pemungutan pajak hiburan mungkin tidak sama di setiap daerah. Akibatnya, analisis harus dilakukan untuk memahami kebijakan pemungutan pajak hiburan yang berlaku di wilayah Galaxy Reflexology. Analisis tersebut dapat meliputi jenis pajak yang dikenakan, besarnya tarif pajak, dan prosedur pembayaran pajak. (2) Kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak hiburan menjadi hal penting. Karena pelaku usaha yang patuh dalam membayar pajak dapat membantu meningkatkan pendapatan pemerintah. Akibatnya, analisis harus dilakukan untuk mengetahui seberapa baik Galaxy Reflexology membayar pajak untuk hiburan. (3) Pengeluaran Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Pemerintah. Kontribusi tersebut dapat dihitung berdasarkan besarnya pendapatan Galaxy Reflexology dan besarnya tarif pajak hiburan yang dikenakan. Bagian dari pajak hiburan dalam pendapatan pemerintah saat menganalisis efektivitas pemungutan pajak hiburan di Galaxy Reflexology, dampak pajak hiburan terhadap pendapatan pemerintah juga harus dipertimbangkan. Biaya ini dapat dihitung berdasarkan pendapatan Galaxy Reflexology dan jumlah pajak hiburan yang dikenakan. Analisis ini dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan pemungutan pajak hiburan berfungsi dengan baik dan berdampak signifikan terhadap pendapatan pemerintah.

Dari analisis sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas pemungutan pajak restoran dan pajak hiburan harus dianalisis pada Galaxy Reflexology untuk mengetahui kepatuhan perusahaan, kontribusi pajak terhadap pendapatan negara, dan efektivitas kebijakan pemungutan pajak hiburan.

## Pembatasan Masalah

Masalah utama yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Pada Galaxy Reflexology Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus : Kota Jakarta Barat Tahun 2021 - 2022

## Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan yang disebutkan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruhnya pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Bagaimana pengaruhnya pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
3. Bagaimana pengaruh pemungutan pajak restoran dan pajak hiburan secara bersama-sama menambah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021 - 2022?

## Tujuan Penelitian

* 1. Mengkaji bagaimana pengaruh pemungutan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
	2. Mengkaji bagaimana pengaruh pemungutan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
	3. Mengkaji bagaimana pengaruh pemungutan pajak restoran dan pajak hiburan untuk menambah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 - 2022.

## Manfaat Penelitian

Studi ini diharapkan memberikan manfaat baik dalam ranah teori maupun dalam implementasi praktis.

### Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan kajian ilmu perpajakan yang dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya.
2. Mengembangkan wawasan kajian ilmu perpajakan khususnya menyangkut Pajak Daerah yang dapat dijadikan rujukan penelitian berikutnya.

### Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran bagi pimpinan SKPD Kota Jakarta Barat dalam rangka pengambilan keputusan untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan yang akan datang.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai standar untuk kinerja dan ide kerja baru untuk Suku Dinas Pendapatan Daerah (SKPD) di masa mendatang.